



Audit KKP Laporan Keuangan Puskesmas: Integrasi Akuntansi Terpadu Dan Pemeriksaan Akuntansi Sektor Publik

Sonya Nadia Putri¹, Gideon Setyo Budiwitjaksono^{2*}

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Email: sonyanputri1610@gmail.com, gideon.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dalam audit laporan keuangan Puskesmas oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan serta mengkaji keterkaitannya dengan konsep akuntansi terpadu dan audit sektor publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi partisipatif dan wawancara semi – terstruktur. Hasil pengujian menunjukkan bahwa implementasi KKP telah sesuai dalam aspek dokumentasi audit dan triangulasi bukti namun masih belum optimal dalam pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan sistem akuntansi terpadu. Auditor masih menghadapi keterbatasan sistem manual yang menyulitkan integrasi data dan efektivitas audit. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan sistem informasi akuntansi dan pelatihan audit digital untuk meningkatkan kualitas audit sektor publik di Puskesmas, Artikel ini memberikan kontribusi dalam menjembatani teori dan praktik audit sektor publik berbasis pengalaman empiris.

Kata Kunci: *Akuntansi Terpadu, Audit Sektor Publik, Kertas Kerja Pemeriksaan, Observasi, Wawancara*

Abstract

This article aims to analyze the implementation of the Audit Working Papers (KKP) in the audit of Puskesmas financial statements by the Public Accounting Firm (KAP) Bambang, Sutjipto Ngumar and Partners and to examine its relevance to the concepts of integrated accounting and public sector auditing. This study employs a qualitative approach using participatory observation and semi-structured interviews. The results indicate that the implementation of the AWP has been appropriate in terms of audit documentation and evidence triangulation; however, it remains suboptimal in the utilization of information technology and the application of integrated accounting systems. Auditors still face limitations in manual systems that hinder data integration and audit effectiveness. These findings emphasize the importance of strengthening accounting information systems and digital audit training to improve the quality of public sector audits at Puskesmas. This article contributes to bridging the gap between theory and practice in public sector auditing based on empirical experience.

Keywords: *Audit Working Papers, Integrated Accounting, Interviews, Public Sector Audit, Observations*

1. PENDAHULUAN

Audit laporan keuangan pada sektor publik menjadi semakin krusial seiring meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Puskesmas, sebagai penyedia layanan kesehatan dasar yang sebagian besar didanai oleh anggaran pemerintah, wajib menyusun laporan keuangan yang andal dan sesuai standar. Untuk itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) berperan dalam memastikan kewajaran laporan tersebut melalui audit yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik, salah satunya melalui Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

KKP tidak hanya menjadi alat dokumentasi, tetapi juga representasi dari seluruh proses audit yang mencakup pengumpulan bukti, pelaksanaan prosedur, dan kesimpulan yang diambil auditor. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan di sektor publik, khususnya pada Puskesmas yang berstatus BLUD, mendorong perlunya sistem audit yang terdokumentasi secara memadai [1]. Fenomena penyimpangan dan ketidaksesuaian pelaporan keuangan pada sejumlah Puskesmas menjadi sorotan, seperti kasus perbedaan pelaporan realisasi anggaran dengan kondisi fisik program kesehatan yang ditemukan oleh BPK dalam LHP tahun 2023. Berdasarkan IHPS II BPK RI Tahun 2023, ditemukan kasus di Provinsi Sulawesi Selatan dimana realisasi belanja jasa pelayanan kesehatan di beberapa Puskesmas melebihi



anggaran tahun sebelumnya dan bahkan direalisasikan tanpa anggaran Tahun 2023. Selain itu, terdapat retribusi pelayanan senilai lebih Dari Rp 58 juta yang tidak dipungut dan dana administrasi yang belum disetor sesuai mekanisme [2]. Hal ini menunjukkan pentingnya implementasi Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebagai alat kontrol dan evaluasi akuntabilitas publik. Dalam konteks Puskesmas yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), auditor dituntut memahami keterkaitan antar siklus akuntansi, pengelolaan dana kapitasi, serta pelaporan berbasis akrual. Disinilah peran akuntansi terpadu menjadi penting sebagai fondasi evaluasi antar laporan seperti neraca, laporan operasional, dan laporan arus kas.

Selain itu, audit sektor publik memiliki kekhususan tersendiri dibanding sektor swasta, seperti perlunya pemahaman atas regulasi keuangan pemerintah, pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta program, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Pemeriksaan akuntansi sektor publik tidak hanya menilai aspek teknis, tetapi juga memastikan tercapainya tata kelola yang baik dalam layanan publik. Oleh karena itu, integrasi antara teori dan praktik melalui pengalaman langsung di lapangan mejadi penting untuk menjembatani pemahaman mahasiswa akuntansi dalam menghadapi kompleksitas audit sektor publik atau berbasis simulasi, sedangkan artikel ini menyajikan praktik audit nyata melalui partisipasi langsung pada KAP yang menangani audit keuangan Puskesmas secara langsung. Pendekatan naratif-kritis berbasis pengalaman ini memberikan kontribusi unik dalam memperlihatkan bagaimana teori audit dan praktik akuntansi publik bersinergi di ranah profesional.

Temuan dari penelitian sebelumnya [3] menunjukkan bahwa digitalisasi laporan keuangan pada Puskesmas berperan dalam meningkatkan kualitas pelaporan dan meminimalkan kesalahan. Namun, penerapannya belum merata di seluruh daerah, sehingga diperlukan dukungan audit berbasis KKP yang sistematis. Oleh karena itu, artikel ini menjadi relevan untuk memperkuat literatur audit sektor publik berbasis pengalaman empiris. Penelitian terdahulu juga menunjukkan pentingnya pengendalian internal dan kompetensi SDM dalam menentukan kualitas laporan keuangan, terutama di Puskesmas. [4] menemukan bahwa audit internal secara signifikan memperkuat hubungan antara pegendalian internal, kompetensi SDM, dan kualitas laporan keuangan di Puskesmas Lamongan. Selain itu, studi [5] pada BPKAD Surabaya menunjukkan bahwa penerapan E-Accounting meningkatkan efektivitas, kecepatan, dan akurasi pelaporan keuangan daerah. Temuan mendukung pentingnya integrasi antara mekanisme audit (KKP), SDM dan teknologi informasi dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan sektor publik.

Artikel ini disusun berdasarkan partisipasi langsung penulis pada KAP Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan, dan akan membahas bagaimana penerapan KKP dilakukan dalam praktik audit Puskesmas serta bagaimana kasus akuntansi terpadu dan pemeriksaan sektor publik tercermin dalam proses tersebut.

1.1 Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

KKP merupakan dokumentasi sistematis yang disusun auditor untuk mencatat seluruh aktivitas audit, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang diambil selama proses audit. KKP menjadi dasar penilaian kualitas audit serta alat pengawasan dan pertanggungjawaban [6]. Dalam konteks audit sektor publik, KKP digunakan untuk menjamin bahwa prosedur pemeriksaan sesuai dengan Standar pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dan dapat diverifikasi oleh pihak ketiga. Penelitian oleh [7] menunjukkan bahwa penerapan KKP tidak hanya memperkuat dokumentasi administratif, tetapi juga berperan sebagai media akuntabilitas, meningkatkan efisiensi audit, dan memperkecil risiko temuan berulang di sektor publik. Hal ini mendukung pentingnya KKP sebagai aspek krusial dalam pemeriksaan entitas pelayanan publik seperti Puskesmas.

1.2 Kasus Akuntansi Terpadu

Akuntansi terpadu menekankan keterkaitan antar laporan keuangan dan siklus transaksi, seperti hubungan antara pendapatan, pengeluaran, arus kas, dan neraca. Dalam audit Puskesmas, pemahaman menyeluruh terhadap akuntansi terpadu diperlukan karena pengelolaan dana seperti kapitasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) membutuhkan pelaporan yang akurat dan saling mendukung. [8] menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi terpadu dapat meningkatkan efisiensi layanan kesehatan dan keakuratan pelaporan keuangan, khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oleh karena itu, integrasi pendekatan akuntansi terpadu dalam audit KKP memperkuat relevansi dan ketepatan prosedur audit.



1.3 Pemeriksaan AKuntansi Sektor Publik

Audit sektor publik memiliki karakteristik berbeda dengan sektor swasta, diantaranya menyangkut aspek kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, transparansi penggunaan dana publik, dan efektivitas pelayanan. Menurut [9], pemeriksaan entitas publik seperti Puskesmas harus memperhatikan pengelolaan dan transfer seperti DAK dan BOK, serta memastikan akuntabilitas atas belanja publik yang dilakukan.

Lebih lanjut [3] menekankan bahwa digitalisasi laporan keuangan pada Puskesmas memperkuat kualitas pelaporan dan mendorong tercapainya transparansi. KKP menjadi alat yang relevan untuk mencatat, menilai, dan mengawasi kualitas pelaporan digital tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Menurut [10] metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kepentingan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena melalui metode khusus, sehingga menghasilkan data deskriptif yang menjelaskan penyebab serta proses terjadinya fenomena pada objek penelitian [11]. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan observasi partisipatif. Wawancara dilakukan melalui komunikasi langsung antara peneliti dan informan yang dipilih, sedangkan observasi partisipatif melibatkan peneliti secara aktif dalam kegiatan objek penelitian, tidak hanya sebagai pengamat [10]. Proses analisis data dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi dan menyusun kembali informasi yang diperoleh agar lebih mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menerapkan beberapa tahapan dalam pengolahan data yang telah dikumpulkan [12].

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dalam Audit Puskesmas

Selama pelaksanaan magang di Kantor Akuntan Publik (KAP) Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan, penulis terlibat langsung dalam proses audit laporan keuangan Puskesmas. Proses audit diawali dengan penyusunan KKP sebagai dokumentasi atas prosedur, bukti, serta kesimpulan audit.

KKP yang digunakan disusun secara sistematis dengan struktur (1) lembar program kerja audit, (2) kertas kerja analitis, (3) bukti transaksi, (4) catatan temuan selama pelaksanaan audit

Setiap dokumen diberi kode indeks untuk memudahkan penelusuran dan review oleh auditor junior dan dibantu auditor senior. Salah satu contoh temuan yang tercatat adalah ketidaksesuaian nilai persediaan antara laporan keuangan dan hasil stock opname yang kemudian direkomendasikan untuk diperbaiki dalam sistem pencatatan.

Penerapan ini sejalan dengan temuan [1] bahwa KKP berfungsi tidak hanya sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai media akuntabilitas yang membantu auditor menelusuri setiap langkah pemeriksaan dengan tepat. Selain itu, penggunaan KKP mendukung efektivitas pengendalian mutu audit dan menjadi acuan utama dalam penyusunan laporan audit.

3.2 Integrasi Kasus Akuntansi Terpadu dalam Proses Audit

Audit terhadap Puskesmas tidak hanya berfokus pada satu akun tertentu, tetapi mencakup keterkaitan antara berbagai bagian laporan keuangan, seperti belanja operasional, arus kas, dan neraca. Dalam praktiknya, penulis menganalisis bagaimana transaksi pembelian obat (pengeluaran kas dan pencatatan persediaan) memengaruhi posisi keuangan secara keseluruhan.

Contoh konkret ditemukan saat pengujian belanja barang habis pakai, dimana pencatatan atas pengeluaran kas tidak disertai dengan pencatatan persediaan secara memadai. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan akuntansi terpadu, agar laporan keuangan mencerminkan kondisi riil dan saling mendukung antar bagian.

Temuan ini mendukung [2] yang menegaskan bahwa sistem informasi berbasis akuntansi terpadu dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik di sektor kesehatan.



3.3 Pemeriksaan Akuntansi Sektor Publik untuk Meningkatkan Transparansi

Sebagai entitas sektor publik, Puskesmas wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada publik dan regulator. Selama berpartisipasi aktif di KAP Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan, penulis turut serta dalam audit terhadap penggunaan Dana Alokasi Kusus (DAK) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Salah satu isu yang muncul adalah perbedaan antara realisasi anggaran dan laporan kegiatan fisik.

Auditor mencatat temuan ini dalam KKP dan memberikan rekomendasi perbaikan berupa penyusunan laporan pertanggungjawaban yang lebih akurat dan terdokumentasi. Selain itu, terdapat dorongan dari auditor agar Puskesmas beralih dari sistem manual ke sistem BLUD digital untuk meningkatkan akuntabilitas.

Hal ini mendukung temuan [3] yang menekankan bahwa pemeriksaan akuntansi sektor publik mendorong penerapan standar akuntansi pemerintah dan penguatan pengendalian internal. [3] juga menekankan pentingnya digitalisasi laporan keuangan dalam meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan.

4. PENGUJIAN

Pengujian dalam artikel ini dilakukan dengan membandingkan praktik implementasi Kertas Kerja Pemeriksaan(KKP) oleh auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan dengan prinsip – prinsip ideal audit sektor publik berdasarkan literatur dan hasil penelitian sebelumnya. Terdapat empat aspek utama yang diuji yaitu penyusunan dan dokumentasi KKP, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan akuntansi terpadu, dan proses triangulasi bukti audit. Aspek pertama yang diuji adalah penyusunan dan dokumentasi KKP. Berdasarkan observasi dan hasil wawancara dengan auditor senior, diketahui bahwa KKP disusun secara sistematis mengikuti alur prosedur audit, mulai dari identifikasi akun hingga pengumpulan dan evaluasi bukti audit. KKP juga mencatat temuan – temuan material serta menyajikan simpulan pemeriksaan akhir. Praktik ini sejalan dengan temuan [7] yang menyatakan bahwa “KKP yang disusun secara runtut dan terdokumentasi dengan baik dapat meningkatkan kualitas audit dan akuntabilitas auditor terhadap setiap keputusan audit yang diambil”. Dengan demikian, pada aspek ini dapat disimpulkan bahwa implementasi KKP telah sesuai dengan praktik terbaik yang disarankan dalam literatur. Aspek kedua menyangkut pemanfaatan teknologi informasi dalam proses audit. Meskipun auditor telah menggunakan format dokumen yang terstruktur, sebagian besar proses pencatatan dan pengumpulan data audit masih dilakukan secara manual. Keterbatasan penggunaan perangkat digital serta kurangnya sistem informasi audit berbasis *cloud* menjadi kendala dalam efisiensi pelaksanaan audit. Sedangkan menurut [13] “proses audit jarak jauh maupun *on-site* akan lebih efisien dan akurat bila didukung oleh kesiapan SDM, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem manajemen audit berbasis digital”. Oleh karena itu, aspek ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan perkembangan praktik audit digital yang saat ini diadopsi luas dalam sektor publik. Selanjutnya, pada aspek penerapan akuntansi terpadu, ditemukan bahwa Puskesmas sebagai objek audit belum sepenuhnya menerapkan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi antar unit dan akun. Hal ini disampaikan oleh auditor junior yang menyebut bahwa pencatatan transaksi masih dilakukan secara terpisah dan manual. Hal ini berbeda dengan rekomendasi [14] yang menyebutkan bahwa “penggunaan sistem informasi yang terintegrasi membantu auditor dalam melakukan penelusuran data dan mengurangi risiko salah saji laporan keuangan”. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi terpadu di lapangan belum berjalan optimal dan masih membutuhkan perbaikan infrastruktur sistem. Terakhir, aspek yang diuji adalah triangulasi bukti audit. Berdasarkan observasi, auditor memadukan hasil wawancara dengan manajemen, observasi lapangan (seperti stock opname), dan dokumen formal dalam KKP untuk memperkuat temuan. Teknik ini dinilai telah sesuai dengan prinsip audit sektor publik sebagaimana dikemukakan oleh [15] yang menegaskan bahwa “keberhasilan audit publik terletak pada kemampuan auditor untuk menggabungkan temuan dokumen, observasi lapangan, dan komunikasi langsung dalam satu sistem dokumentasi yang utuh”. Dengan demikian aspek triangulasi dapat dinilai telah sesuai dan dilaksanakan secara memadai. Secara keseluruhan, pengujian ini menunjukkan bahwa implementasi KKP oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan telah sesuai dengan literatur pada aspek dokumentasi dan triangulasi bukti audit. Namun masih diperlukan penguatan pada aspek pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan sistem akuntansi terpadu agar kualitas audit dapat ditingkatkan lebih lanjut.



5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan selama keterlibatan aktif dalam proses audit di Kantor Akuntan Publik Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan, dapat disimpulkan bahwa Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) memegang peranan penting dalam mendukung kualitas audit laporan keuangan Puskesmas. KKP tidak hanya menjadi media dokumentasi, tetapi juga alat evaluasi, kontrol, dan akuntabilitas terhadap seluruh prosedur audit yang dilakukan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan KKP telah sesuai dalam aspek penyusunan sistematis dan triangulasi bukti audit, namun masih ditemukan keterbatasan dalam penggunaan teknologi informasi dan sistem akuntansi yang terintegrasi. Puskesmas sebagai objek audit belum sepenuhnya menggunakan sistem informasi digital, sehingga menyulitkan proses penelusuran dan konsistensi data. Dari sisi akuntansi terpadu, keterakitan antar laporan keuangan belum sepenuhnya tercermin, khususnya dalam pencatatan persediaan dan arus kas. Sementara itu, pada aspek pemeriksaan akuntansi sektor publik, ditemukan pentingnya pemahaman atas regulasi dana publik seperti DAK dan BOK agar auditor dapat memberikan rekomendasi yang tepat dan akuntabel. Oleh karenanya, integrasi antara praktik audit lapangan dan teori akuntansi publik menjadi penting dalam memperkuat kompetensi auditor, khususnya dalam menghadapi tantangan audit di sektor publik. Artikel ini menyarankan peningkatan kapasitas auditor melalui pelatihan KKP berbasis digital serta digitalisasi sistem informasi keuangan pada entitas layanan publik.

REFERENCES

- [1] I. G. Rakhmatullah and R. Reskino, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit dengan Pengalaman Auditor sebagai Variabel Moderasi," *Co-Value J. Ekon. Kop. Dan Kewirausahaan*, vol. 15, no. 2, Jul. 2024, doi: 10.59188/covalue.v15i2.4492.
- [2] BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan, "IHPD 2023." 2023.
- [3] A. Maratusholeha, C. Kuntadi, and R. Pramukty, "ANALISIS DIGITALISASI LAPORAN KEUANGAN, TRANSPARANSI, DAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PUSKESMAS DI KOTA BEKASI," vol. 15, no. 9, 2025.
- [4] M. S. Nadhifah, A. Mahmudah, A. P. Dilasari, A. Salukh, and H. N. Ani, "PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI SDM, DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN: PERAN MODERASI AUDIT INTERNAL," *Media Komun. Ilmu Ekon.*, vol. 41, no. 1, pp. 62–76, Jan. 2025, doi: 10.58906/melati.v41i1.217.
- [5] F. F. Rohma, B. Agustina, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura, M. Gymnastiar, and Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura, "IMPLEMENTASI E-ACCOUNTING DAN EFEKTIVITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI KASUS BPKAD KOTA SURABAYA," *JRMA J. Ris. Manaj. Dan Akunt.*, vol. 11, no. 2, pp. 93–106, Aug. 2023, doi: 10.33508/jrma.v11i2.1163.
- [6] E. Suhayati, "D. KEPEMILIKAN KERTAS KERJA DAN KERAHASIAAN INFORMASI DALAM KERTAS KERJA".
- [7] R. Farhat and M. Munari, "Penerapan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Op Schedule terhadap Audit Laporan Keuangan," *Akunt. 45*, vol. 5, no. 2, pp. 234–243, Nov. 2024, doi: 10.30640/akuntansi45.v5i2.3351.
- [8] T. E. Natalia and Marliyah, "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Peningkatan Efisiensi Pada Pelayanan Rawat Inap Di UPTD Puskesmas Hiliweto Gido," *Kompak J. Ilm. Komputerisasi Akunt.*, vol. 17, no. 2, pp. 299–304, Nov. 2024, doi: 10.51903/kompak.v17i2.2119.
- [9] F. Misra and G. A. Sabila, "Analisis Kesiapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Puskesmas: Pengujian Luderâ€™s Contingency Model (Studi Deskriptif pada Puskesmas Kabupaten Tanah Datar)," *Akunt. DEWANTARA*, vol. 4, no. 2, pp. 160–175, Mar. 2021, doi: 10.26460/ad.v4i2.7160.
- [10] A. F. Nasution, *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- [11] Syarifuddin and I. Al Saudi, *METODE RISET PRAKTIS REGRESI BERGANDA DENGAN SPSS*. Palangkaraya: Bobby Digital Center, 2022.
- [12] Z. Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- [13] F. Awaliah and Dwi Setiawan S, "Analisis Penerapan Pendekatan Audit Jarak Jauh Dampak dari Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI)," *Owner*, vol. 7, no. 1, pp. 741–752, Jan. 2023, doi: 10.33395/owner.v7i1.1311.
- [14] S. Wulandari and A. Arsyadona, "Analisis Peran Auditor Internal Pemerintah dalam Mitigasi Risiko Fraud pada Sektor Pemerintahan," *J. Rimba Ris. Ilmu Manaj. Bisnis Dan Akunt.*, vol. 3, no. 1, pp. 223–238, Jan. 2025, doi: 10.61132/rimba.v3i1.1594.
- [15] N. Prananda, N. S. Rangkuti, T. M. T. Ashal, and R. Bahagia, "Audit Sektor Publik: Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Perusahaan Publik".